

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Aparat Desa Dalam pemberdayaan Keluarga Penerima PKH” maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Verifikasi data oleh aparat desa, lalu pengecekan data komponen memenuhi syarat atau tidak bagi penerima bantuan PKH mencoret penerima bantuan yang dianggap sudah mampu dan tidak lagi membutuhkan bantuan PKH serta pemutakhiran oleh BPS dan diserahkan ke Kemensos. Adapaun aplikasi yang digunakan disini adalah aplikasi *SIKS-NG*, aplikasi ini digunakan untuk mengelola data terpadu program penangana fakir msikin dan orang tidak mampu. Setelah warga yang menerima bantuan PKH terdaftar maka aparat desa akan memberi tahu warga yang bersangkutan dan warga dapat mencairkan dana bantuan ke bank atau BRLlink desa atau BRLlink sekitar. Dana PKH akan cair setiap tiga bulan satu kali, dalam proses pengambilan dana bantuan warga masyarakat tidak didampingi oleh pendamping PKH ataupun aparat desa, setiap keluarga mendapatkan pendapatan dana bantuan yang berbeda, tergantung berapa banyak jumlah anggota keluarga yang namanya terdaftar dalam penerima bantuan serta tingkatan pendidikan yang ditempuh. Adapaun mekanisme pencairan dana PKH hingga sampai ketangan masyarakat, pertama adalah pengumuman oleh aparat desa bahwa hari dan tanggal sekian akan ada pencairan dana PKH, kedua masyarakat akan mengambil dana bantuan atau mencairkan secara mandiri di ATM atau BRILink desa.
2. Bentuk komunikasi yang digunakan aparat desa dalam mebina program keluaraga harapan ini adalah komunikasi dua arah. Di mana aparat dan pendamping akan menyampaikan pesan sebagai *public relation* dari organisasi pemerintahan dan masyarakat akan mendengarkan segala

informasi yang disampaikan. Dalam proses ini pendamping dan aparat desa bertugas sebagai *public information* di mana mereka akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh *public*/masyarakat yakni informasi untuk kepentingan *public* dan bukan informasi untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan organisasi. Dalam proses ini segala pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ada di tangan aparat desa dan pendamping PKH. Setelah proses penyampaian informasi selesai, barulah masyarakat diperbolehkan bertanya mengenai hal yang kurang atau tidak mengerti terkait penjelasan yang telah disampaikan.

3. Hambatan komunikasi dalam pembinaan keluarga penerima bantuan PKH terbagi menjadi 3, yakni hambatan teknologi, minimnya attensi, dan keluhan masyarakat, hambatan teknologi terjadi saat aparat desa atau pendamping ingin menyampaikan informasi secara cepat dan akurat namun masyarakat tidak mempunyai handphone atau kebanyakan tidak paham dengan teknologi informasi, minimnya attensi terjadi saat pendamping PKH dan aparat desa melakukan pembinaan dengan menyampaikan informasi namun masyarakat tidak mau mendengarkan, mengobrol dan sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing dan keluhan yang terjadi adalah rasa malu atau sungkan saat ingin bertanya mengenai informasi yang masih belum dipahami.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ada beberapa saran yang diharapkan oleh peneliti untuk keberlanjutan penelitian mengenai bantuan PKH di Kampung Palendeng ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Saran Akademis**

Karena pembahasan kali ini adalah pola komunikasi aparat desa yang dilakukan saat membina keluarga penerima bantuan PKH maka penulis menyarankan untuk selanjutnya ada penelitian yang lebih spesifik mengenai pola komunikasi ini. Proses penelitian yang dilakukan seperti kesejahteraan

masyarakat penerima bantuan PKH atau perhatian terhadap anak disabilitas yang menerima bantuan PKH dengan rincian yang lebih mendalam serta konsep dan cara baru yang belum terealisasi dalam penelitian ini sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih optimal.

## 2. Saran Praktis

Peneliti harap masyarakat Desa Sindangwangi khususnya masyarakat Kampung Palendeng dapat mempergunakan dana PKH yang diberikan dengan sebaik mungkin. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan tidak perlu mengharapkan bantuan lebih lanjut, selain itu lebih banyak anak-anak yang mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan dengan layak, serta lebih banyak masyarakat kreatif yang mampu membangun usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga bantuan PKH ini tidak perlu diterima lagi.